BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

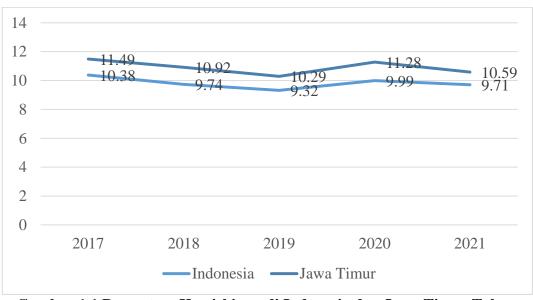
Masalah utama yang dihadapi oleh negara berkembang khususnya Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan muncul karena adanya ketidakmampuan sebagian hidup masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, derajat kesehatan yang rendah, dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup. Menurut Bank Dunia dalam Lamas (2022) salah satu penyebab kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan tingkat kesehatan maupun pendidikan yang dapat diterima. Selain itu, kemiskinan juga berkaitan dengan terbatasnya lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin itu tidak memiliki pekerjaan (pengangguran).

Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang penting untuk mencapai keberhasilan pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi bagi sebagian masyarakat dipandang sebagai tolak ukur untuk melihat kinerja perekonomian suatu wilayah, suatu perekonomian dianggap baik apabila pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Namun kenyataan yang terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering kali diiringi dengan masalah-masalah perekonomian seperti kemiskinan, pengangguran, dan

ketimpangan pendapatan. Hal tersebut memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi itu diperlukan, namun tidak mencukupi dalam proses pembangunan suatu wilayah dalam jangka panjang, karena tidak semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Saat ini sebagian besar negara berkembang mulai menyadari bahwa tidak selamanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan pembangunan ekonomi yang baik. Pembangunan ekonomi sendiri merupakan suatu proses yang mengakibatkan pendapatan per kapita masyarakat suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu mengalami kenaikan. Namun pada kenyataannya pembangunan ekonomi sering dihadapkan dengan masalah kemiskinan. Setiap negara pastinya akan berusaha keras untuk mencapai pembangunan suatu negara dengan menurunkan tingkat kemiskinan dan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi (Sanjaya, 2019).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menjadi salah satu persoalan mendasar dan menjadi pusat perhatian di negara manapun (Sanjaya, 2019). Salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia adalah tingginya ketimpangan antar daerah akibat tidak meratanya distribusi pendapatan, sehingga kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di Indonesia semakin meluas. Masalah kemiskinan ini hampir terjadi di setiap provinsi di Indonesia salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur. Berikut merupakan perkembangan tingkat kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur dan Indonesia.



Gambar 1.1 Persentase Kemiskinan di Indonesia dan Jawa Timur Tahun 2017-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.

Berdasarkan gambar 1.1, kemiskinan di Jawa Timur masih melebihi angka kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut tentu menjadi sebuah permasalahan mengingat Jawa Timur memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut data BPS (2022) rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur dinyatakan berada di urutan ke lima belas dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

Tabel 1.1 Persentase Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2017-2021

Tahun	DI Yogyakarta	Jawa Tengah	Jawa Timur	Jawa Barat	Banten	DKI Jakarta			
2017	12,69	12,62	11,49	8,27	5,52	3,77			
2018	11,97	11,25	10,92	7,35	5,24	3,56			
2019	11,57	10,69	10,29	6,86	5,01	3,45			
2020	12,54	11,62	11,28	8,15	6,27	4,61			
2021	11,91	11,25	10,59	7,97	6,50	4,67			

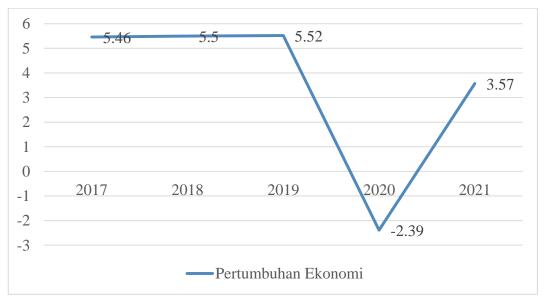
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.

Berdasarkan tabel 1.1, tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur berada diposisi tertinggi ketiga dibandingkan provinsi di Pulau Jawa lainnya (BPS, 2022). Secara umum tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena adanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi di semua kelas sosial di mana pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh sekelompok kecil masyarakat. Pada tahun 2017-2019 tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 0,99%. Hal ini terjadi karena kenaikan harga bahan pokok akibat kelangkaan sembako pada saat pandemi Covid-19. Akibatnya, terjadi ketimpangan distribusi pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

Menurut Todaro (2015) dalam Gurning *et al* (2021) terdapat interaksi akibat kemiskinan dengan tingkat pendapatan yang rendah, ketimpangan pendapatan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan yang kurang optimal. Memilah hal tersebut maka kemiskinan perlu dituntaskan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah minimum provinsi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu indikator yang penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu wilayah. Menurut Sukirno (2013:25) dalam Ishak *et al* (2020) pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) untuk mengurangi

kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Maknanya pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk golongan penduduk miskin (*growth with equity*).



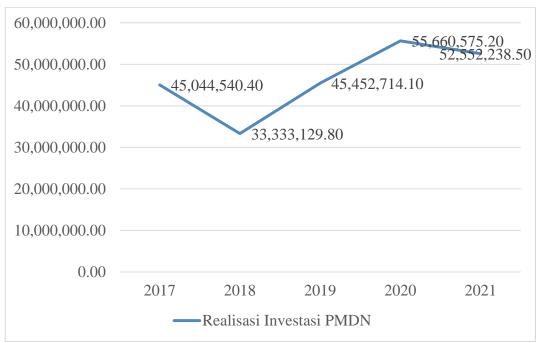
Gambar 1.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2017-2021 (Dalam Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, diolah.

Berdasarkan gambar 1.2, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Sepanjang tahun 2017-2019 secara umum pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya iklim investasi dan kinerja perdagangan yang berimbas pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan positif ini tidak lepas dari kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah Jawa Timur, baik dari kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang kondusif mendorong tumbuhnya hampir semua sektor lapangan usaha. Namun, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi sebesar -2,39%. Hal tersebut

terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang cukup menggoncang perekonomian. Pada tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi tumbuh positif menjadi sebesar 3,57%. Hal ini terjadi karena adanya pelonggaran kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejalan dengan penurunan laju penyebaran pandemi Covid-19 yang berimplikasi pada membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat (BI, 2022).

Selain pertumbuhan ekonomi, faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah investasi. Investasi memiliki peranan penting bagi perekonomian. Menurut Sukirno (2000) dalam Gurning *et al* (2021) kegiatan yang memungkinkan untuk terus meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat yaitu dengan melakukan investasi, penananam modal akan meningkatkan kegiatan perekonomian dan kesempatan kerja sehingga akan meningkatkan pendapatan nasional dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi menjadi sumber yang paling penting untuk daerah yang sedang berkembang dan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan yang cukup besar untuk pembangunan (Suharlina, 2020).



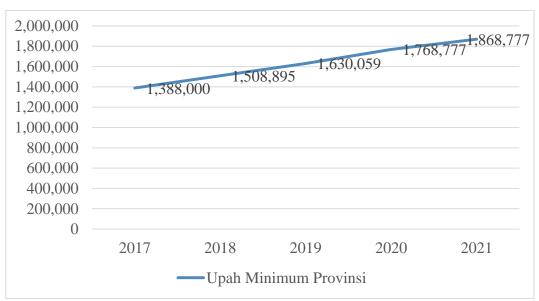
Gambar 1.3 Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2017-2021 (Dalam Juta Rupiah)

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah.

Berdasarkan gambar 1.3, realisasi investasi penanaman modal dalam negeri di Jawa Timur mengalami fluktuasi. Realisasi investasi penanaman modal dalam negeri tertinggi dicapai 2020 sebesar pada tahun yaitu Rp55.660.575.200.000 dan juga merupakan realisasi investasi dalam negeri tertinggi se-Indonesia. Pertumbuhan positif ini merupakan kebangkitan investasi di Jawa Timur. Selama tahun 2020 terdapat peningkatan sebesar 33,8 persen dibanding tahun sebelumnya. Dalam rangka meningkatkan investasi, pemerintah melalui BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) memberikan kemudahan dan penyederhanaan prosedur bagi kegiatan investasi melalui peraturan pemerintah dan peraturan menteri/lembaga terkait. Hal ini dilakukan untuk menarik investor untuk berinvestasi.

Selain pertumbuhan ekonomi dan investasi, faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah upah minimum provinsi. Kemiskinan dapat diatasi melalui upaya peningkatan pendapatan. Bagi penduduk yang bekerja sebagai pekerja, produktivitas pekerja dapat ditingkatkan melalui upah. Upah minimum yang tidak sesuai dengan meningkatnya nilai kebutuhan hidup layak (KHL) di suatu daerah akan berdampak pada meningkatnya kemiskinan (Sari, 2021).

Kenaikan upah minimum memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang layak bagi masyarakat dan agar konsumsi masyarakat juga meningkat. Adanya konsumsi masyarakat yang meningkat akan mendorong munculnya jenis usaha baru. Hal ini akan berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan (Islami & Anis, 2019).



Gambar 1.4 Perkembangan Upah Minimum Provinsi Tahun 2017-2021 (Dalam Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.

Berdasarkan gambar 1.4, upah minimum provinsi Jawa Timur terus meningkat setiap tahunnya, mengingat kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Dapat dilihat pada tahun 2017 upah minimum provinsi Jawa Timur sebesar Rp1.388.000 sementara pada tahun 2021 telah mencapai angka Rp1.868.777. Hal ini disebabkan karena kebutuhan pekerja yang semakin banyak dan mengakibatkan setiap peringatan hari buruh para buruh menuntut adanya kenaikan upah minimum setiap tahunnya.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah minimum provinsi terhadap tingkat kemiskinan dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2021".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, terdapat masalahmasalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut diidentifikasikan sebagai berikut:

 Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah minimum provinsi secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2021?

- 2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah minimum provinsi secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2021?
- 3. Bagaimana kualitas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut dapat dikemukakan tujuan penelitian yaitu:

- Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah minimum provinsi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2021 secara parsial.
- Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah minimum provinsi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2021 secara bersama-sama.
- Untuk mengetahui kualitas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2021.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat berguna baik secara pengembangan ilmu dan praktis:

1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan tambahan dan memberi kajian yang lebih lengkap mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai faktor apa saja yang berpengaruh dan kurang berpengaruh dengan studi kasus di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2021.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah serta instansi terkait dalam mengambil kebijakan, penelitian ini bermaksud untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dan seberapa besar pengaruhnya sehingga *output* dari penelitian ini akhirnya dapat digunakan oleh pemerintah dan instansi terkait untuk mempertimbangkan perumusan kebijakan pembangunan ekonomi dalam rangka mengurangi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan pembelajaran dalam proses untuk memecahkan sebuah masalah dengan teori, menambah wawasan terkait hubungan antar variabel penelitian.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan data sekunder yang setiap variabelnya diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta beberapa sumber media *online* yang relevan dan terpercaya.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September 2022 diawali dengan pengajuan judul kepada jurusan ekonomi pembangunan dan diperkirakan selesai bulan Januari 2023 yang diakhiri dengan sidang skripsi dan revisi naskah skripsi. Berikut jadwal penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian

Vaciator	Tahun 2022												Tahun 2023						
Kegiatan	September		Oktober			November			Desember			Januari							
	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul																			
Penyusunan usulan penelitian																			
Seminar usulan penelitian																			
Revisi usulan penelitian																			
Penyusunan skripsi																			
Sidang skripsi																			
Revisi skripsi																			